**ANALISIS KESENJANGAN WILAYAH DAN KESENJANGAN PENDAPATAN DI INDONESIA TAHUN 2015-2018**

**Farris Adiat, dan Achmad Tjachja N1**

1Program Studi Agribisnis Fakultas Sains dan Teknologi, Uin Syarif Hidayatullah Jakarta

***ABSTRACT***

*This study aims to find out the development of regional gap and income inequality in Indonesia. The method used is a qualitative descriptive approach gained by using secondary data by analyzing the data. Writer used Williamson index to find out how much income inequality while regional gap is identified using gini ratio. Based on Williamson index, it indicates that there is high regional gap found in Indonesia during 2015 to 2018, at 0.739 in 2015 to 0.747 in 2018. Whereas gini ratio shows that 13 provinces indicated tends to increase during 2015 to 2018 while other provinces tend to decrease during that time.*

***Keyword: regional gap, income gap, economy growth***

**PENDAHULUAN**

Secara umum tujuan dari pembangunan ekonomi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu secara teknis diperlukan upaya agar tercapai pertumbuhan ekono­mi dan distribusi pendapatan yang lebih merata dan baik. Peningkatan dan pertumbuhan perekonomian daerah akan membawa pengaruh terhadap pe­ningkatan kesejahteraan rakyat di daerah (Raswita & Made, 2013)[[1]](#footnote-1). Diskusi dan perdebatan antara ketimpangan dan pertumbuhan ekonomi adalah topik terkait perekonomian dan pembanguan di berbagai negara, tanpa terkecuali Indonesia. Terdapatnya keterkaitan yang erat antara ketimpangan dan pertumbuhan ekonomi dalam kehidupan masyarakat dan stabilitas sosial (Dewanto et al, 2014)[[2]](#footnote-2).

Kondisi terjadinya ketimpangan pembangunan antar wilayah dapat juga berdampak pada keseimbangan dan percepatan perpu­taran kegiatan ekonomi. Dimana hal ini akan berpengaruh pada ketimpangan kemakmuran antardaerah yang bersangkutan. Tambunan (2001)[[3]](#footnote-3) menyatakan bahwa terkonsentrasinya kegiatan ekonomi pada suatu daerah tertentu seca­ra langsung berdampak pada ketimpangan pandapatan antardaerah. Hal ini akan menciptakan kondisi dimana daerah yang menjadi pusat konsentrasi kegiatan ekonomi akan lebih mampu memberikan kontribusi kesempatan pendapatan yang le­bih tinggi kepada masyarakatnya sehing­ga masyarakatnya relatif lebih makmur, sementara disisi lain daerah yang bukan merupakan pusat kegiatan ekonomi hanya mampu memberikan kontribusi kesempatan pendapatan yang ren­dah sehingga berakibat relatif rendah pula kemakmuran masyarakatnya.

Oleh sebab itu upaya unruk mewujudkan pemerataan ketimpangan pembangunan mennjadi sangat penting agar tujuan dari pembangunan yakni peningkatan ketersediaan, perluasan distribusi barang kebutuhan pokok, serta peningkatan standar hidup masyarakat dapat terwujud secara bersama-sama baik pada tingkat re­gional maupun nasional[[4]](#footnote-4). Kesenjangan pembangunan secara ekonomi diartikan sebagai adanya perbe­daan yang mencolok antara golongan orang kaya dan orang miskin dalam hal distribusi pendapatan, distribusi kesejahteraan, latar belakang pendidikan, jenis pekerjaan, ting­kat kepuasan dan kebahagiaan hidup[[5]](#footnote-5).

**TINJAUAN PUSTAKA**

Pendorong terjadinya kesenjangan di suatu negara cukup banyak. Namun dalam konteks Indonesia kesenjangan tidak terlepas dari adanya keragaman potensi sumber daya alam, letak geografis, kualitas sumber daya manusia, ikatan etnis atau politik serta lainnya. Oleh karena itu secara singkat negara harus berupaya melakukan redistribusi pendapatan masyarakat sebagai prioritas utama, dan |redistribusi perekonomian daerah selanjutnya. Selain itu pula upaya mengurangi kesenjangan perekonomian antardaerah adalah mengurangi jarak antara daerah terkaya dengan daerah termiskin, melalui upaya khusus untuk mengangkat daerah termiskin secara signifikan. Bagi suatu daerah upaya menekan kesenjangan ketersediaan infrastruktur dan kemampuan keuangan antardaerah menjadi salah satu upaya agar tidak terjadinya kesenjangan antardaerah di Indonesia.

Infrastruktur merupakan suatu input dalam proses produksi yang dapat memberikan peningkatan produktivitas marjinal pada output. Sementara itu kesenjangan dari sisi kemampuan keuangan antardaerah dapat dilihat dari aspek jumlah pendapatan daerah, dan kualitas belanja daerah. Kedua aspek di atas memiliki pengaruh nyata terhadap kinerja perekonomian daerah.

Kesenjangan berarti suatu gambaran terhadap fakta (kondisi) yang tidak homogen, yang di dalamnya terdapat perbedaan-perbedaan yang membutuhkan perhatian[[6]](#footnote-6). Atas dasar pengertian tersebut, analisis kesenjangan antarwilayah dimaksudkan untuk memberi gambaran fakta-fakta perbedaan perkembangan kondisi hasil pembangunan antarwilayah, juga terkandung informasi mengenai perbandingan antarwilayah dan informasi adanya *gap* (kesenjangan) antara daerah yang maju dan tertinggal.

Peta kesenjangan antarwilayah ini dibangun melalui pendekatan pengolahan dan teknik penyajian data, sehingga dapat memberi gambaran fakta kesenjangan antarwilayah. Berdasarkan temuan fakta kesenjangan ini, selanjutnya diharapkan dapat menjadi dasar dalam menentukan isu dan permasalahan strategis yang perlu direspon melalui kebijakan dan program pembangunan.

**Analisis Kesenjangan Perekonomian Antarwilayah**

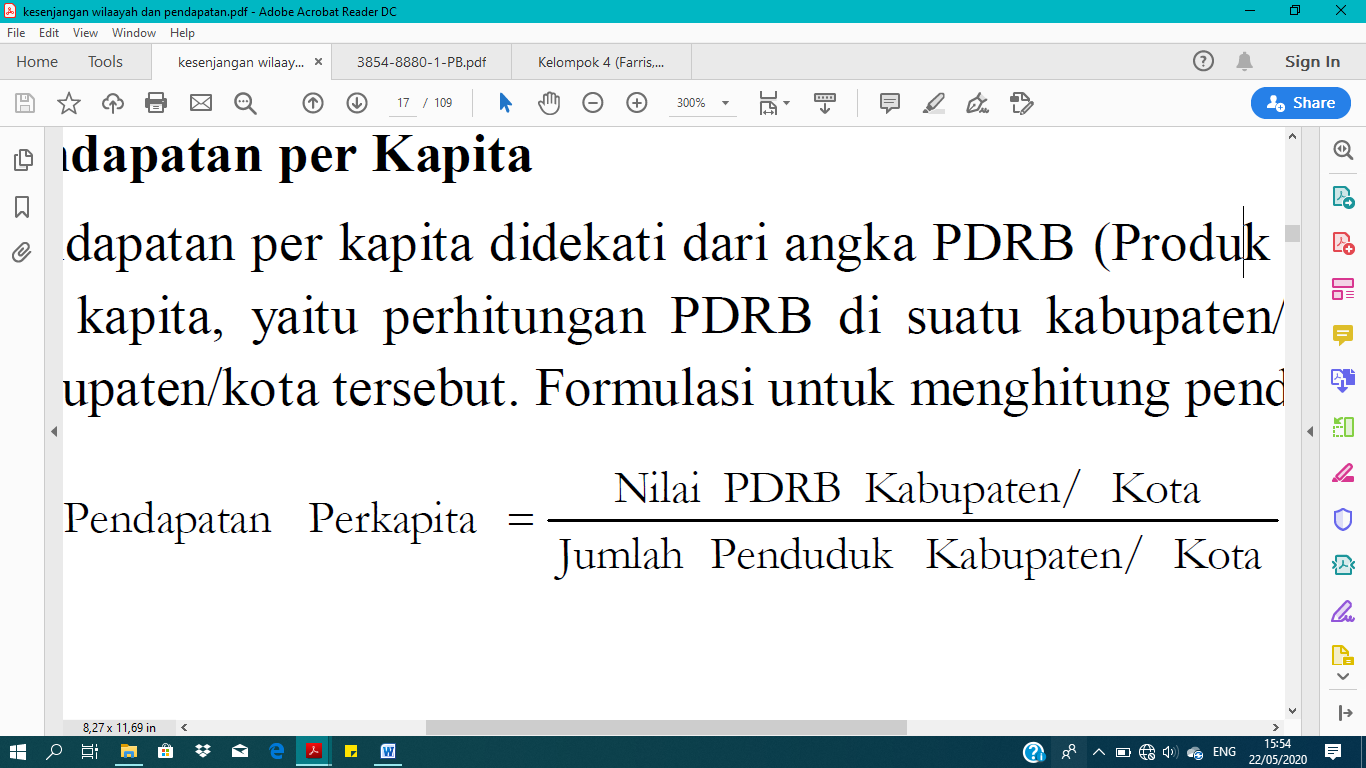
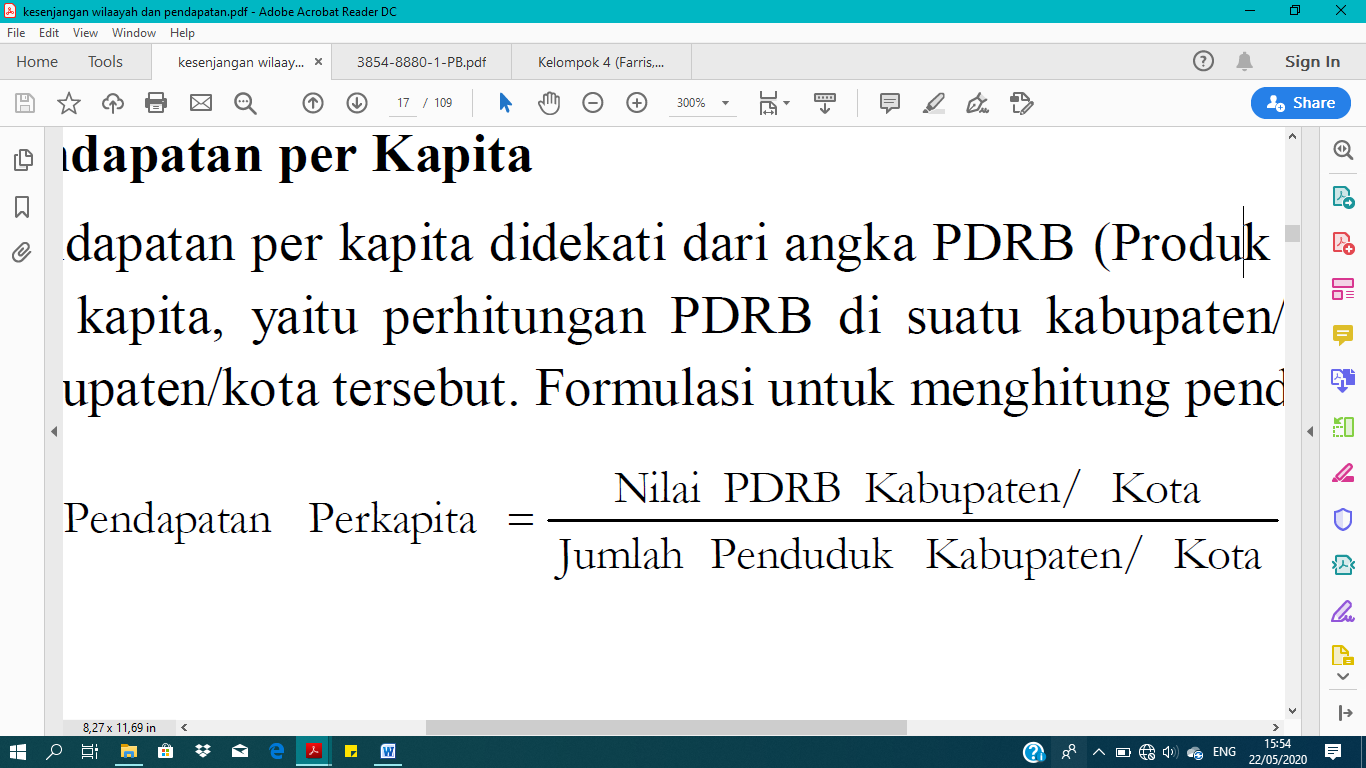
Untuk dapat merepresentasikan pendapatan regional secara umum dapat menggunakan parameter output regional (pendekatan produksi) yang sangat terkait dengan area tertentu, dalam hal ini Provinsi digunakan sebagai satuan terkecil. Data yang digunakan ialah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut Provinsi.

**Analisis Pendapatan Regional**

Analisis kesenjangan regional dapat ditunjukkan berdasarkan perhitungan disparitas PDRB Perkapita antarwilayah, perhitungan yang digunakan dalam analisis kesenjangan pendapatan antarwilayah adalah *Indeks Williamson* (*CVw). Indeks Williamson* ini sederhana dan populer digunakan untuk mengukur kesenjangan pendapatan regional, khususnya pendapatan dalam pengertian indikator PDRB per kapita.

1. Pendapatan per Kapita

Pendapatan per kapita didekati dari angka PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) per kapita, yaitu perhitungan PDRB di suatu kabupaten/kota dibagi oleh populasi kabupaten/kota tersebut. Formulasi untuk menghitung pendapatan per kapita adalah:

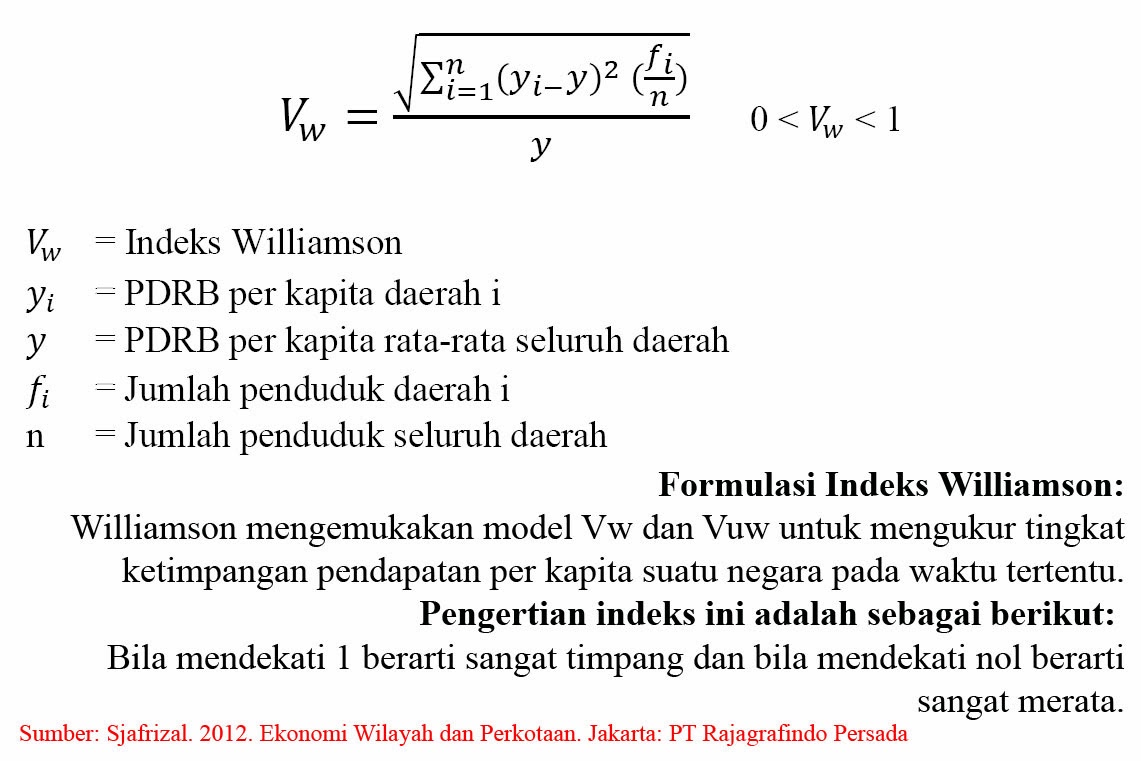
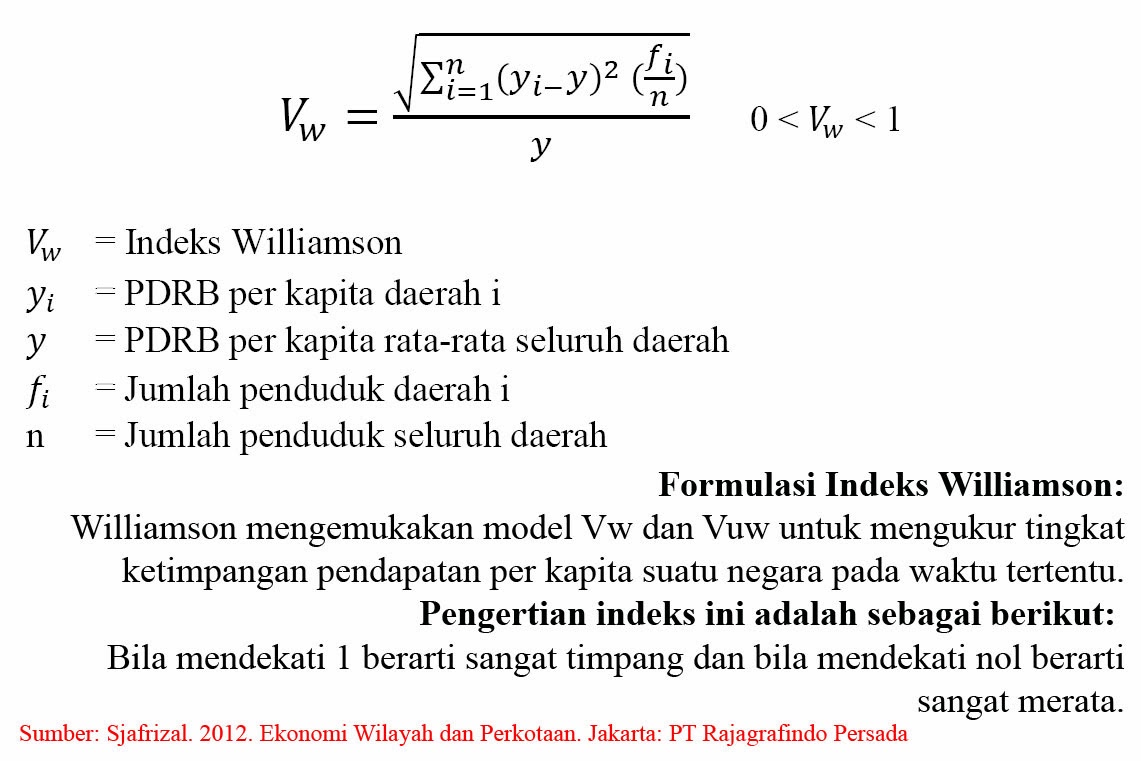


Data yang digunakan untuk mengolah variabel ini berasal dari buku PDRB

Kabupaten dan Kota serta Kabupaten dalam Angka.

1. *CVw* (CV Williamson)

Indeks Williamson merupakan pendekatan untuk mengukur derajat ketimpangan antarwilayah berdasarkan PDRB perkapita. Formula ini pada dasarnya sama dengan *coefficient of variation (CV)* biasa dimana standar deviasi dibagi dengan rataan. Williamson (1965) memperkenalkan *CV* ini dengan menimbangnya dengan proporsi penduduk, yang disebut *CVw*. Formulanya adalah sebagai berikut:



**Analisis Kesenjangan Berdasarkan Pola dan Struktur Pertumbuhan Ekonomi.**

Menurut BPS[[7]](#footnote-7), Tipologi Klassen juga merupakan salah satu alat analisis ekonomi regional yang digunakan untuk mengetahui gambaran tentang pola dan struktur pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Melalui Analisis Tipologi Klassen ini selain digunakan untuk mengidentifikasi posisi perekonomian suatu daerah dengan memperhatikan perekonomian daerah yang diacunya, dan mengidentifikasi sektor, subsektor, usaha, atau komoditi unggulan suatu daerah, juga dapat memberi gambaran adanya kesenjangan antarwilayah berdasarkan posisi perekonomian yang dimiliki suatu daerah terhadap perekonomian nasional maupun daerah yang diacunya.

|  |
| --- |
| Rata-rata Pertumbuhan Ekonomi |

**Analisis Kesenjangan Infrastruktur Antarwilayah**

Untuk melihat adanya kesenjangan infrastruktur antarwilayah, dilakukan perbandingan ketersediaan dan dukungan infrastruktur sesuai dengan jenisnya. Jenis

infrastruktur yang akan menunjukkan adanya kesenjangan meliputi infrastruktur jalan, energi listrik dan telekomunikasi. Indikator yang digunakan meliputi kuantitas dan kualitas dari ketersediaan infrastruktur, serta beberapa indikator yang dihitung berdasarkan formula sebagai berikut:

1. Rasio Kerapatan Jalan
2. Energi Terjual Perkapita (kWh/ Kapita)
3. Rasio Elektrifikasi

**Analisis Pendapatan dan Belanja Daerah**

Analisis keuangan diarahkan untuk mengetahui sisi pendapatan daerah dan belanja pembangunan. Analisis dari sisi pendapatan, meliputi:

* *Tax Ratio*
* Ruang Fiskal
* Rasio kemandirian daerah dicerminkan oleh rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan, serta rasio transfer terhadap total pendapatan.

Sedangkan analisis dari sisi belanja daerah, meliputi:

* Rasio belanja pegawai terhadap total belanja.
* Rasio belanja pegawai tidak langsung terhadap total belanja.
* Rasio belanja modal per total belanja.

Semua rasio tersebut menunjukkan kecenderungan pola belanja daerah, apakah suatu daerah cenderung mengalokasikan dananya untuk belanja yang terkait erat dengan upaya peningkatan ekonomi, seperti belanja modal, atau untuk belanja yang sifatnya untuk pendanaan aparatur, seperti belanja pegawai tidak langsung.

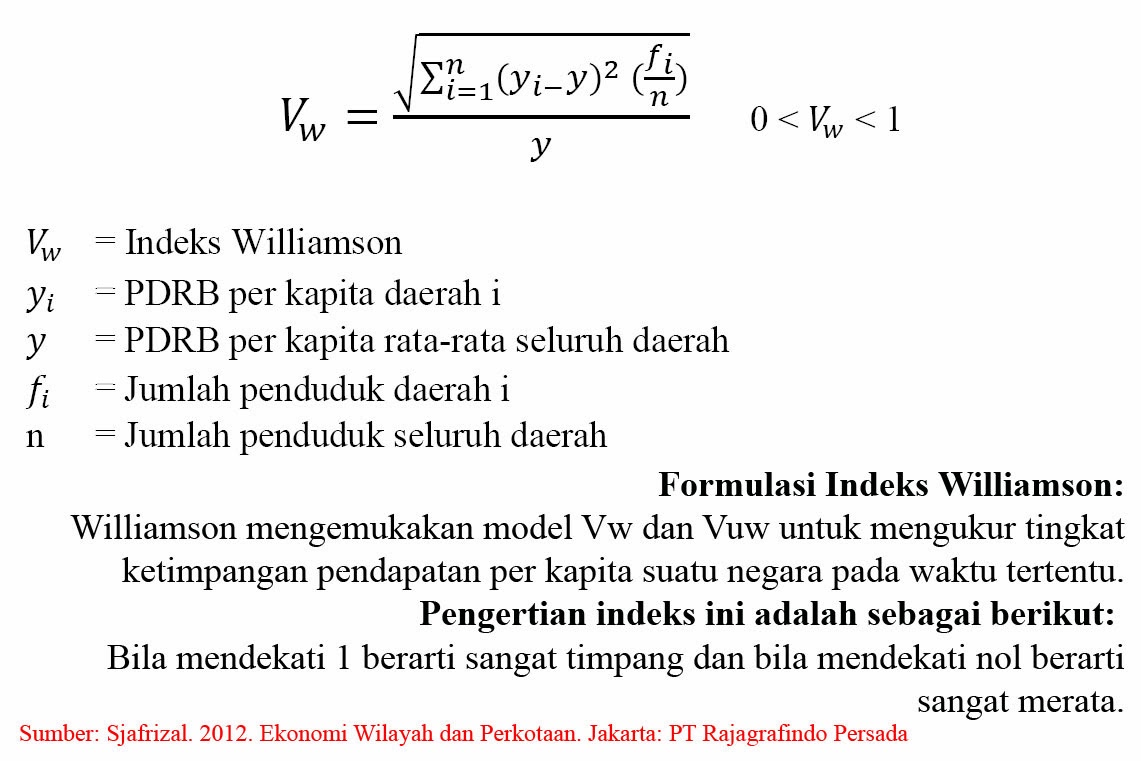
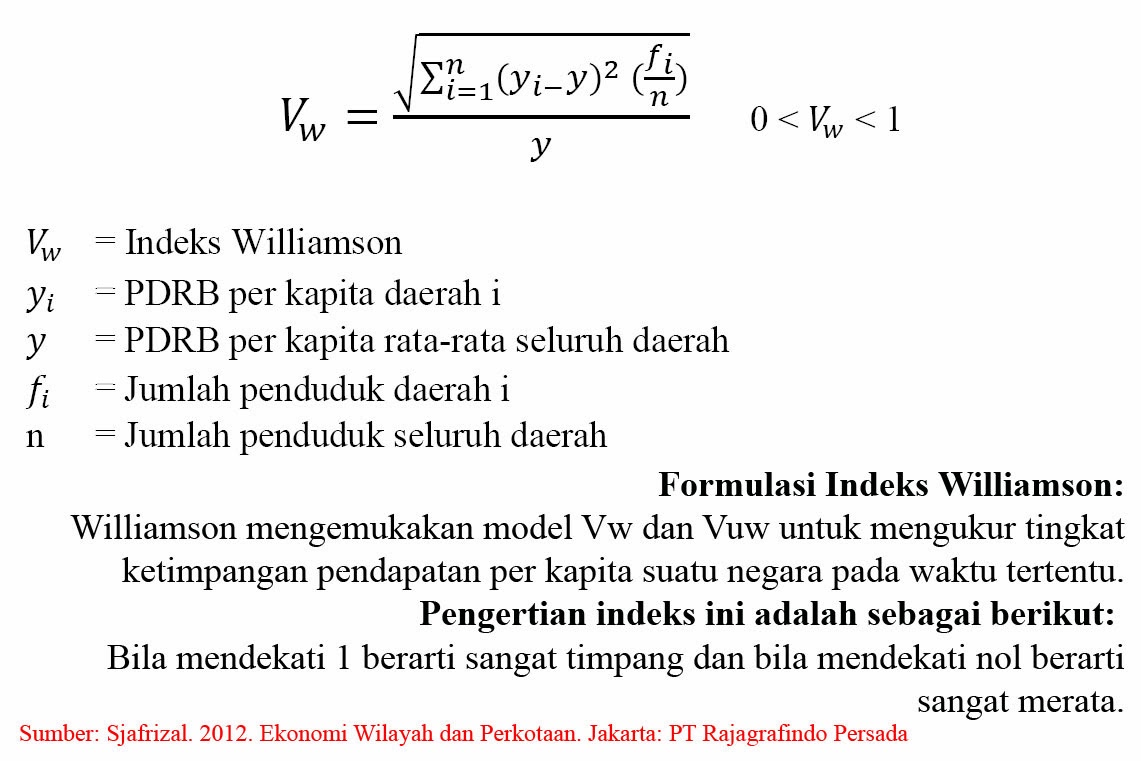
**TUJUAN PENULISAN**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kesenjangan wilayah dan kesenjangan pendapatan antarprovinsi di Indonesia dalam rentang waktu tahun 2015 sampai 2018.

**METODE PENELITIAN**

Jenis Penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Jenis data yang digunakan adalah data se­kunder yang didapat secara langsung dari Badan Pusat Statistik (BPS), yang meliputi PDRB menurut provinsi tahun 2015 sampai dengan 2018, jumlah penduduk menurut provinsi, serta rasio gini menurut provinsi tahun 2015-2018. Alat analisis data menggunakan Indeks Williamson dan rasio gini.

Ketimpangan pembangunan (kesen­jangan wilayah) antarprovinsi di Indonesia akan dianalisa menggunakan Indeks Ketimpangan Wil­liamson dengan formula sebagai berikut:



Angka indeks ketimpangan william­son yang semakin kecil atau mendekati nol menunjukkan ketimpangan yang semakin kecil atau pembangunan antarwilayah se­makin merata dan bila semakin jauh dari titik nol (mendekati satu) menunjukkan ketimpangan yang semakin melebar.

Sedangkan untuk penilaian tingkat kesenjangan pendapatan diukur dengan rasio gini dengan rumus perhitungan sebagai berikut:

**GR = 1 - Σfi [Yi + Yi-1]**

Ket:

fi = jumlah persen (%) penerima pendapatan kelas ke i.

Yi = jumlah kumulatif (%) pendapatan pada kelas ke i.

Nilai GR terletak antara nol sampai dengan satu.

Bila GR = 0, ketimpangan pendapatan merata sempurna, artinya setiap orang menerima pendapatan yang sama dengan yang lainnya.

Bila GR = 1 artinya ketimpangan pendapatan timpang sempurna atau pendapatan itu hanya diterima oleh satu orang atau satu kelompok saja.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Kesenjangan Wilayah (Indeks Williamson)**

Besar-kecilnya ketimpangan PDRB per kapita antarprovinsi memberikan gambaran perkembangan pembangunan di Indonesia. Pertumbuhan ekonomi merupakan kunci untuk mengatasi masalah kemiskin­an, menurunkan tingkat pertumbuhan eko­nomi, melindungi lingkungan dan memper­kuat tatanan sipil. Pertumbuhan ekonomi diukur dari pertumbuhan PDRB suatu da­erah, semakin tinggi PDRB menunjukkan semakin tinggi output barang dan jasa yang dihasilkan.

Tingkat kesejahteraan masyara­kat dari sisi ekonomi dapat diukur dari se­berapa besar PDRB perkapita yang diterima. Namun demikian, tingginya PDRB perka­pita yang diterima tersebut belum mampu menggambarkan kondisi kesejahteraan masya­rakat yang sebenarnya. Mungkin saja terjadi nilai PDRB per kapita tinggi namun sebagi­an besar PDRB perkapita tersebut dinikmati oleh sebagian kecil masyarakat (Tambunan, 2001)[[8]](#footnote-8).

Besar-kecilnya ketimpangan PDRB perkapita antarprovinsi memberi­kan gambaran tentang kondisi perkemban­gan pembangunan di Indonesia. Gambaran tentang perkembangan pembangunan daerah di Indonesia dapat dilihat dari pemerataan PDRB perkapita antarprovinsi yang dianalisis dengan menggunakan indeks Williamson. Formula indeks Williamson menggunakan PDRB perkapita dan jumlah penduduk. Nilai indeks Williamson dipero­leh antara nol dan satu (0< IW <1 ). Angka indeks Williamson yang semakin kecil atau mendekati nol menunjukkan ketimpan­gan yang semakin kecil atau dengan kata lain makin merata, dan apabila semakin jauh dari nol menunjukkan ketimpangan semakin melebar (Kuncoro, 2004)[[9]](#footnote-9).

Dalam menganalisis kesenjangan wilayah di Indonesia, penulis menggunakan alat analisis berupa indeks williamson hal ini dikarenakan model ini dirasa cukup representatif untuk mengukur tingkat ketimpangan pembangunan antarwilayah. Hasil indeks williamsonuntuk ketimpangan pembangunan secara nasional menunjukan bahwa ketimpangan pembangunan sangat tinggi atau pembangunan antarwilayah tidak merata.Pembangunan wilayah di Indonesia dikatakan tidak merata karena berdasarkan hasil perhitungan penulis menggunakan excel[[10]](#footnote-10), didapat data indeks williamson sebagai berikut:

1. 0,739 pada tahun 2015;
2. 0,735 pada tahun 2016;
3. 0,741 pada tahun 2017;
4. 0,747 pada tahun 2018.

Data tersebut mengindikasikan bahwa kesenjangan pembangunan antarwilayah di Indonesia cenderung meningkat dari tahun ketahun. Perkembangan ke­timpangan pembangunan antarprovinsi di Indonesia dapat dilihat pada lampiran.

**Kesenjangan Pendapatan (Rasio Gini)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Wilayah** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** |
| Indonesia | 0.402 | 0.394 | 0.391 | 0.384 |
| Aceh | 0.339 | 0.341 | 0.329 | 0.318 |
| Sumatera Utara | 0.326 | 0.312 | 0.335 | 0.311 |
| Sumatera Barat | 0.319 | 0.312 | 0.312 | 0.305 |
| Riau | 0.366 | 0.347 | 0.325 | 0.347 |
| Jambi | 0.344 | 0.346 | 0.334 | 0.335 |
| Sumatera Selatan | 0.334 | 0.362 | 0.365 | 0.341 |
| Bengkulu | 0.371 | 0.354 | 0.349 | 0.355 |
| Lampung | 0.352 | 0.358 | 0.333 | 0.326 |
| Kep. Bangka Belitung | 0.275 | 0.288 | 0.276 | 0.272 |
| Kep. Riau | 0.339 | 0.352 | 0.359 | 0.339 |
| DKI Jakarta | 0.421 | 0.397 | 0.409 | 0.390 |
| Jawa Barat | 0.426 | 0.402 | 0.393 | 0.405 |
| Jawa Tengah | 0.382 | 0.357 | 0.365 | 0.357 |
| D.I. Yogyakarta | 0.420 | 0.425 | 0.440 | 0.422 |
| Jawa Timur | 0.403 | 0.402 | 0.415 | 0.371 |
| Banten | 0.386 | 0.392 | 0.379 | 0.367 |
| Bali | 0.339 | 0.374 | 0.379 | 0.364 |
| NTB | 0.360 | 0.365 | 0.378 | 0.391 |
| NTT | 0.348 | 0.362 | 0.359 | 0.359 |
| Kalimantan Barat | 0.330 | 0.331 | 0.329 | 0.325 |
| Kalimantan Tengah | 0.300 | 0.347 | 0.327 | 0.344 |
| Kalimantan Selatan | 0.334 | 0.351 | 0.347 | 0.340 |
| Kalimantan Timur | 0.315 | 0.328 | 0.333 | 0.342 |
| Kalimantan Utara | 0.314 | 0.305 | 0.313 | 0.304 |
| Sulawesi Utara | 0.366 | 0.379 | 0.394 | 0.372 |
| Sulawesi Tengah | 0.370 | 0.347 | 0.345 | 0.317 |
| Sulawesi Selatan | 0.404 | 0.400 | 0.429 | 0.388 |
| Sulawesi Tenggara | 0.381 | 0.388 | 0.404 | 0.392 |
| Gorontalo | 0.401 | 0.410 | 0.405 | 0.417 |
| Sulawesi Barat | 0.362 | 0.371 | 0.339 | 0.366 |
| Maluku | 0.338 | 0.344 | 0.321 | 0.326 |
| Maluku Utara | 0.286 | 0.309 | 0.330 | 0.336 |
| Papua Barat | 0.428 | 0.401 | 0.387 | 0.391 |
| Papua | 0.392 | 0.399 | 0.398 | 0.398 |

Tabel 2. Rasio Gini Provinsi di Indonesia Tahun 2015-2018[[11]](#footnote-11)

Tingkat kesenjangan pendapatan penduduk di Indonesia dalam periode 20015-2018 memiliki kecenderungan menurun, hal ini ditunjukan dengan Indeks Gini dari tahun 2015 hingga 2018 yang semakin menurun. Pada tahun 2018 tercatat Indeks Gini sebesar 0,84 (lebih kecil dibandingkan tahun-tahun sebelumnya). Sementara untuk perkembangan Indeks Gini masing-masing provinsi pada tahun 2015-2018, secara keseluruhan dapat dikategorikan rendah dan berfluktuatif dengan kecenderungan menurun, hal ini menunjukan bahwa tingkat kesenjangan pendapatan di setiap provinsi rata-rata semakin rendah.

Berdasarkan data pada tabel 2, tercatat 14 provinsi yang memiliki Indeks Gini cenderung meningkat setiap tahunnya, yaitu Provinsi Riau, Yogyakarta, Bali, NTB, NTT, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Maluku, Maluku Utara, dan Papua, sementara kesenjangan tingkat pendapatan di provinsi lain memiliki kecenderungan semakin menurun. Hal ini dapat diartikan bahwa sekitar 40% dari wilayah (provinsi) di Indonesia masih memiliki kesenjangan pendapatan yang tinggi dan akan terus menigkat tiap tahunnya jika pemerintah tidak mengambil langkah antisipasi yang tepat.

**KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan penelitian diketahui bahwa;

1. Hasil analisis tentang ketimpangan pem­bangunan antarprovinsi di Indonesia periode 2015-2018 dengan menggunakan Indeks Williamsom menun­jukkan bahwa kesenjangan wilayah masih tinggi dengan nilai Indeks yang terus mengalami peningkatan, yaitu pada tahun 2015 nilai indeks williamson sebesar 0,739, kemudian ditahun 2016 mengalami penurunan menjadi 0,735 dan pada tahun 2017 kembali meningkat menjadi 0.741, kemudian terus meningkat menjadi 0,747 di tahun 2018.
2. Kesenjangan pendapatan antarprovinsi di Indonesia tahun 2015-2018 dianalisis dengan menggu­nakan Indeks rasio gini. Hasil analisis menunjukkan bahwa 40% (14 Provinsi) nilai indeks rasio gini dari keseluruhan provinsi cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun sementara sisanya (20 provinsi) memiliki kecenderungan menurun. Nilai indeks yang menurun sema­kin mendekati nol berarti distribusi penda­patan mulai merata. Secara keseluruhan, pemerataan pendapatan di Indonesia sudah cukup baik karena berdasarkan tabel 2 maka didapat data sebagai berikut; tahun 2015 (0.402), tahun 2016 (0.394), 2017 (0.391), dan pada tahun 2018 sebesar (0.384). Dengan kata lain, kesenjangan pendapatan di Indonesia selama periode 2015-2018 semakin menurun.

**DAFTAR PUSTAKA**

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Analisis Kesenjangan Antarwilayah. 2013.

<https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwj4pNjZ18rpAhW98HMBHQABCyAQFjAAegQIAxAB&url=http%3A%2F%2Fperpustakaan.bappenas.go.id%2Flontar%2Ffile%3Ffile%3Ddigital%2F139281-%255B_Konten_%255D-Konten%2520C9754a.pdf&usg=AOvVaw2VmCwKNSMV8IQHeQmgdS0L>

Dewanto, Pendi. et al. (2014). Analisis pengaruh per­tumbuhan ekonomi dan ketimpangan penda­patan terhadap Pengentasan kemiskinan di kawasan mebidangro. Jurnal Ekonom, Vol 17, No 3, Juli 2014.

Gini rasio provinsi 2002-2019 https://www.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/1116 (diakses tanggal 28 maret 2020).

Produk Domestik Regional Bruto Provinsi-Provinsi di Indonesia menurut Lapangan Usaha 2014-2018.

<https://www.bps.go.id/publication/2019/07/26/dc449d34a26ec840acb305a9/produk-domestik-regional-bruto-provinsi-provinsi-di-indonesia-menurut-lapangan-usaha-2014-2018.html>

Provinsi DI Yogyakarta Dalam Angka 2019. https://yogyakarta.bps.go.id/publication/2019/08/16/fe0f0460b0cdd1bcd76a4314/provinsi-di-yogyakarta-dalam-angka-2019.html

Raswita, Ngakan Putu Mahesa Eka., dan Made Suyana Utama. (2013). Analisis Pertumbuhan Ekono­mi dan Ketimpangan Pendapatan Antar Keca­matan Di Kabupaten Gianyar 2013. E-Jurnal EP Unud, 2 [3] : 119-128

Statistik Indonesia 2019 <https://www.bps.go.id/publication/2019/07/04/daac1ba18cae1e90706ee58a/statistik-indonesia-2019.html>

Ardiwidjaja, Roby. 2020. Pariwisata budaya: pelestarian budaya sebagai daya tarik ke-Indonesiaan. Sidoarjo. Uwais Inspirasi Indonesia

Sutarno., dan Mudrajad Kuncoro. (2004). Pertumbu­han Ekonomi dan Ketimpangan antar Keca­matan di Kabupaten Banyumas, 1993-2000. Jurnal Ekonomi Pembangunan

Tambunan, Tulus. (2001). Perekonomian Indonesia: Beberapa Masalah Penting. Jakarta : Ghalia In­donesia Erlangga

Yuliani, Tutik. Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pendapatan Antar Kabupaten di Kalimantan Timur. Jejak 8 (1) (2015): 1-88. DOI: 10.15294/jejak.v7i1. Journal of economics adn policy.

**LAMPIRAN**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2015** | **Jumlah Penduduk (Jiwa)** | **PDRB (Juta Rp)** | **PDRB per Kapita (Rp/tahun)** | **Proporsi Penduduk** |  |  |
| Indonesia | 255.461.700,00 | 11.652.686.000,00 |  |  |  |  |
| Aceh | 5.002.000,00 | 129.093.000,00 | 25.808.276,69 | 0,0196 | 522.364.806.099.729,00 | 10.228.025.414.811,10 |
| Sumatera Utara | 13.937.800,00 | 571.722.000,00 | 41.019.529,62 | 0,0546 | 58.431.478.275.768,10 | 3.187.977.915.718,87 |
| Sumatera barat | 5.196.300,00 | 179.952.000,00 | 34.630.794,99 | 0,0203 | 196.919.004.013.063,00 | 4.005.493.663.250,02 |
| Riau | 6.344.400,00 | 652.762.000,00 | 102.887.901,14 | 0,0248 | 2.940.277.200.904.920,00 | 73.021.884.194.073,70 |
| Jambi | 3.402.100,00 | 155.066.000,00 | 45.579.495,02 | 0,0133 | 9.511.568.933.933,43 | 126.669.902.651,30 |
| Sumatera Selatan | 8.052.300,00 | 331.766.000,00 | 41.201.395,87 | 0,0315 | 55.684.164.718.525,20 | 1.755.196.961.278,27 |
| Bengkulu | 1.874.900,00 | 50.334.000,00 | 26.846.231,80 | 0,0073 | 475.996.602.983.202,00 | 3.493.463.133.351,13 |
| Lampung | 8.117.300,00 | 252.883.000,00 | 31.153.585,55 | 0,0318 | 306.599.841.738.443,00 | 9.742.215.351.042,70 |
| Kep. Bangka Belitung | 1.372.800,00 | 60.987.000,00 | 44.425.262,24 | 0,0054 | 17.963.322.002.127,70 | 96.531.293.906,37 |
| Kep. Riau | 1.973.000,00 | 199.570.000,00 | 101.150.532,18 | 0,0077 | 2.754.880.340.967.960,00 | 21.276.688.101.307,50 |
| DKI Jakarta | 10.177.900,00 | 1.989.089.000,00 | 195.432.161,84 | 0,0398 | 21.541.017.150.646.800,00 | 858.219.914.991.438,00 |
| Jawa Barat | 46.709.600,00 | 1.524.975.000,00 | 32.647.999,55 | 0,1828 | 256.498.758.612.249,00 | 46.899.219.786.272,10 |
| Jawa Tengah | 33.774.100,00 | 1.010.987.000,00 | 29.933.795,42 | 0,1322 | 350.804.762.013.418,00 | 46.379.222.845.214,70 |
| D.I. Yogyakarta | 3.679.200,00 | 101.441.000,00 | 27.571.482,93 | 0,0144 | 444.876.481.869.922,00 | 6.407.181.789.269,46 |
| Jawa Timur | 38.847.600,00 | 1.691.477.000,00 | 43.541.351,33 | 0,1521 | 26.237.207.854.566,30 | 3.989.844.880.273,84 |
| Banten | 11.955.200,00 | 479.300.000,00 | 40.091.341,01 | 0,0468 | 73.483.250.111.296,70 | 3.438.898.871.065,90 |
| Bali | 4.152.800,00 | 176.413.000,00 | 42.480.495,09 | 0,0163 | 38.230.516.491.726,20 | 621.477.461.736,30 |
| Nusa Tenggara Barat | 4.835.600,00 | 105.665.000,00 | 21.851.476,55 | 0,0189 | 718.888.793.722.438,00 | 13.607.748.836.417,40 |
| Nusa Tenggara Timur | 5.120.100,00 | 76.121.000,00 | 14.867.092,44 | 0,0200 | 1.142.202.448.208.840,00 | 22.892.632.261.799,20 |
| Kalimantan Barat | 4.789.600,00 | 146.654.000,00 | 30.619.258,39 | 0,0187 | 325.597.476.466.235,00 | 6.104.561.557.692,12 |
| Kalimantan Tengah | 2.495.000,00 | 100.064.000,00 | 40.105.811,62 | 0,0098 | 73.235.368.391.229,20 | 715.262.773.778,29 |
| Kalimantan Selatan | 3.989.800,00 | 137.056.000,00 | 34.351.596,57 | 0,0156 | 204.832.817.487.628,00 | 3.199.078.277.534,91 |
| Kalimantan Timur | 3.426.700,00 | 500.105.000,00 | 145.943.619,23 | 0,0134 | 9.463.406.386.366.120,00 | 126.939.790.442.797,00 |
| Kalimantan Utara | 641.900,00 | 61.722.000,00 | 96.155.164,36 | 0,0025 | 2.255.450.757.765.250,00 | 5.667.283.359.538,88 |
| Sulawesi Utara | 2.412.100,00 | 91.146.000,00 | 37.786.990,59 | 0,0094 | 118.300.157.560.388,00 | 1.117.004.271.291,59 |
| Sulawesi Tengah | 2.876.700,00 | 107.573.000,00 | 37.394.584,07 | 0,0113 | 126.990.228.141.455,00 | 1.430.010.014.395,60 |
| Sulawesi Selatan | 8.520.300,00 | 340.390.000,00 | 39.950.471,23 | 0,0334 | 75.918.232.715.482,50 | 2.532.066.913.379,68 |
| Sulawesi Tenggara | 2.499.500,00 | 87.714.000,00 | 35.092.618,52 | 0,0098 | 184.170.945.915.629,00 | 1.801.973.756.990,24 |
| Gorontalo | 1.133.200,00 | 28.493.000,00 | 25.143.840,45 | 0,0044 | 553.178.062.668.741,00 | 2.453.837.035.517,33 |
| Sulawesi Barat | 1.282.200,00 | 32.988.000,00 | 25.727.655,59 | 0,0050 | 526.056.544.834.547,00 | 2.640.355.488.853,54 |
| Maluku | 1.686.500,00 | 34.346.000,00 | 20.365.253,48 | 0,0066 | 800.795.180.465.045,00 | 5.286.667.519.453,20 |
| Maluku Utara | 1.162.300,00 | 26.638.000,00 | 22.918.351,54 | 0,0045 | 662.816.694.374.506,00 | 3.015.684.323.213,57 |
| Papua Barat | 871.500,00 | 62.888.000,00 | 72.160.642,57 | 0,0034 | 552.112.035.094.622,00 | 1.883.513.804.945,96 |
| Papua | 3.149.400,00 | 150.307.000,00 | 47.725.598,53 | 0,0123 | 879.805.824.664,86 | 10.846.480.956,63 |
| Rata-rata PDRB per Kapita | | | 85.637.991,10 |  | 48.663.578,18 | 5.669.614.557.025.530,00 |
|  |  |  |  |  |  | 35.974.827,64 |
|  |  |  |  |  | **Indeks Williamson** | **0,73926** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2016** | **Jumlah Penduduk (Jiwa)** | **PDRB (Juta Rp)** | **PDRB per Kapita (Rp/tahun)** | **Proporsi Penduduk** |  |  |
| Indonesia | 258.705.000,00 | 12.621.833.000,00 |  |  |  |  |
| Aceh | 5.096.200,00 | 136.844.000,00 | 26.852.164,36 | 0,0197 | 615.305.302.967.535,00 | 12.120.828.298.576,20 |
| Sumatera Utara | 14.102.900,00 | 626.063.000,00 | 44.392.500,83 | 0,0545 | 52.780.396.425.843,20 | 2.877.241.076.724,55 |
| Sumatera barat | 5.259.500,00 | 196.099.000,00 | 37.284.722,88 | 0,0203 | 206.577.085.163.535,00 | 4.199.733.980.470,46 |
| Riau | 6.501.000,00 | 681.699.000,00 | 104.860.636,83 | 0,0251 | 2.830.572.423.990.410,00 | 71.129.476.926.853,50 |
| Jambi | 3.458.900,00 | 171.199.000,00 | 49.495.215,24 | 0,0134 | 4.675.530.000.096,46 | 62.512.091.831,75 |
| Sumatera Selatan | 8.160.900,00 | 353.867.000,00 | 43.361.271,43 | 0,0315 | 68.827.618.095.337,90 | 2.171.180.721.339,92 |
| Bengkulu | 1.904.800,00 | 55.384.000,00 | 29.076.018,48 | 0,0074 | 509.923.878.118.029,00 | 3.754.480.984.284,11 |
| Lampung | 8.205.100,00 | 279.418.000,00 | 34.054.185,81 | 0,0317 | 309.877.115.130.000,00 | 9.828.077.220.591,65 |
| Kep. Bangka Belitung | 1.401.800,00 | 65.048.000,00 | 46.403.195,89 | 0,0054 | 27.607.844.406.527,30 | 149.593.847.390,16 |
| Kep. Riau | 2.028.200,00 | 216.008.000,00 | 106.502.317,33 | 0,0078 | 3.007.952.601.977.080,00 | 23.581.799.607.003,80 |
| DKI Jakarta | 10.277.600,00 | 2.159.074.000,00 | 210.075.698,61 | 0,0397 | 25.096.321.647.756.700,00 | 997.004.137.403.546,00 |
| Jawa Barat | 47.379.400,00 | 1.653.238.000,00 | 34.893.603,55 | 0,1831 | 281.028.647.709.319,00 | 51.467.767.191.507,30 |
| Jawa Tengah | 34.019.100,00 | 1.087.317.000,00 | 31.961.956,67 | 0,1315 | 387.914.924.797.796,00 | 51.009.901.695.710,20 |
| D.I. Yogyakarta | 3.720.900,00 | 109.962.000,00 | 29.552.527,61 | 0,0144 | 488.630.362.598.597,00 | 7.027.868.484.154,24 |
| Jawa Timur | 39.075.300,00 | 1.855.738.000,00 | 47.491.330,84 | 0,1510 | 17.357.070.711.530,70 | 2.621.645.291.642,13 |
| Banten | 12.203.100,00 | 517.898.000,00 | 42.439.871,84 | 0,0472 | 84.964.901.832.461,10 | 4.007.789.542.342,46 |
| Bali | 4.200.100,00 | 194.090.000,00 | 46.210.804,50 | 0,0162 | 29.666.629.415.933,60 | 481.640.518.002,60 |
| Nusa Tenggara Barat | 4.896.200,00 | 116.465.000,00 | 23.786.814,26 | 0,0189 | 776.775.827.469.389,00 | 14.701.106.690.847,20 |
| Nusa Tenggara Timur | 5.203.500,00 | 83.743.000,00 | 16.093.590,85 | 0,0201 | 1.264.792.532.295.970,00 | 25.439.585.403.459,90 |
| Kalimantan Barat | 4.861.700,00 | 161.364.000,00 | 33.190.859,16 | 0,0188 | 341.017.290.260.098,00 | 6.408.549.351.800,38 |
| Kalimantan Tengah | 2.550.200,00 | 111.967.000,00 | 43.905.183,91 | 0,0099 | 60.098.600.646.041,00 | 592.425.547.892,52 |
| Kalimantan Selatan | 4.055.500,00 | 146.090.000,00 | 36.022.685,24 | 0,0157 | 244.447.827.482.291,00 | 3.832.002.336.075,57 |
| Kalimantan Timur | 3.501.300,00 | 508.880.000,00 | 145.340.302,17 | 0,0135 | 8.776.465.056.420.100,00 | 118.780.221.109.154,00 |
| Kalimantan Utara | 666.300,00 | 66.042.000,00 | 99.117.514,63 | 0,0026 | 2.252.451.790.014.050,00 | 5.801.235.490.950,55 |
| Sulawesi Utara | 2.436.900,00 | 100.514.000,00 | 41.246.665,85 | 0,0094 | 108.385.730.786.215,00 | 1.020.951.227.664,44 |
| Sulawesi Tengah | 2.921.700,00 | 120.030.000,00 | 41.082.246,64 | 0,0113 | 111.836.250.843.489,00 | 1.263.029.218.953,72 |
| Sulawesi Selatan | 8.606.400,00 | 377.109.000,00 | 43.817.275,52 | 0,0333 | 61.469.318.024.431,90 | 2.044.914.240.720,01 |
| Sulawesi Tenggara | 2.551.000,00 | 96.995.000,00 | 38.022.344,18 | 0,0099 | 185.917.818.726.991,00 | 1.833.270.928.557,83 |
| Gorontalo | 1.150.800,00 | 31.698.000,00 | 27.544.317,00 | 0,0044 | 581.446.203.700.089,00 | 2.586.452.875.739,02 |
| Sulawesi Barat | 1.306.500,00 | 35.945.000,00 | 27.512.437,81 | 0,0051 | 582.984.638.076.402,00 | 2.944.161.997.823,08 |
| Maluku | 1.715.500,00 | 37.054.000,00 | 21.599.533,66 | 0,0066 | 903.482.099.614.258,00 | 5.991.084.601.721,11 |
| Maluku Utara | 1.185.900,00 | 29.151.000,00 | 24.581.330,63 | 0,0046 | 733.119.631.494.256,00 | 3.360.609.849.013,50 |
| Papua Barat | 893.400,00 | 66.631.000,00 | 74.581.374,52 | 0,0035 | 525.503.444.092.762,00 | 1.814.749.529.203,04 |
| Papua | 3.207.400,00 | 173.209.000,00 | 54.002.930,72 | 0,0124 | 5.500.986.023.884,82 | 68.200.701.853,49 |
| Rata-rata PDRB per Kapita | | | 85.637.991,10 |  | 51.657.512,63 | 5.669.614.557.025.530,00 |
|  |  |  |  |  |  | 37.973.388,39 |
|  |  |  |  |  | **Indeks Williamson** | **0,73510** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2017** | **Jumlah Penduduk (Jiwa)** | **PDRB (Juta Rp)** | **PDRB per Kapita (Rp/tahun)** | **Proporsi Penduduk** |  |  |
| Indonesia | 261.890.900,00 | 13.742.287.000,00 |  |  |  |  |
| Aceh | 5.189.500,00 | 145.807.000,00 | 28.096.541,09 | 0,0198 | 760.969.052.356.784,00 | 15.078.984.787.961,40 |
| Sumatera Utara | 14.262.100,00 | 684.275.000,00 | 47.978.558,56 | 0,0545 | 59.346.224.127.763,50 | 3.231.886.954.195,72 |
| Sumatera barat | 5.321.500,00 | 213.890.000,00 | 40.193.554,45 | 0,0203 | 239.898.407.707.499,00 | 4.874.622.893.027,04 |
| Riau | 6.657.900,00 | 704.798.000,00 | 105.858.904,46 | 0,0254 | 2.517.700.806.403.720,00 | 64.006.042.970.394,50 |
| Jambi | 3.515.000,00 | 189.868.000,00 | 54.016.500,71 | 0,0134 | 2.774.582.802.534,71 | 37.239.394.537,61 |
| Sumatera Selatan | 8.267.000,00 | 382.886.000,00 | 46.314.987,30 | 0,0316 | 87.744.835.082.902,20 | 2.769.804.340.778,36 |
| Bengkulu | 1.934.300,00 | 60.658.000,00 | 31.359.148,01 | 0,0074 | 591.611.276.822.821,00 | 4.369.581.733.303,38 |
| Lampung | 8.289.600,00 | 306.700.000,00 | 36.998.166,38 | 0,0317 | 349.093.434.142.593,00 | 11.049.810.939.091,20 |
| Kep. Bangka Belitung | 1.430.900,00 | 69.861.000,00 | 48.823.118,32 | 0,0055 | 47.047.119.639.532,10 | 257.052.549.333,35 |
| Kep. Riau | 2.082.700,00 | 227.763.000,00 | 109.359.485,28 | 0,0080 | 2.881.250.031.133.490,00 | 22.913.279.689.526,10 |
| DKI Jakarta | 10.374.200,00 | 2.365.363.000,00 | 228.004.376,24 | 0,0396 | 29.694.929.457.218.500,00 | 1.176.295.690.973.140,00 |
| Jawa Barat | 48.037.600,00 | 1.788.381.000,00 | 37.228.774,96 | 0,1834 | 340.529.213.472.934,00 | 62.461.911.220.005,70 |
| Jawa Tengah | 34.257.900,00 | 1.172.400.000,00 | 34.222.763,22 | 0,1308 | 460.507.796.570.890,00 | 60.238.939.360.420,20 |
| D.I. Yogyakarta | 3.762.200,00 | 119.131.000,00 | 31.665.249,06 | 0,0144 | 576.814.346.177.984,00 | 8.286.240.313.011,31 |
| Jawa Timur | 39.293.000,00 | 2.012.918.000,00 | 51.228.412,19 | 0,1500 | 19.836.302.588.071,90 | 2.976.154.717.835,21 |
| Banten | 12.448.200,00 | 563.463.000,00 | 45.264.616,57 | 0,0475 | 108.526.223.880.405,00 | 5.158.469.195.027,62 |
| Bali | 4.246.500,00 | 213.550.000,00 | 50.288.472,86 | 0,0162 | 29.092.385.336.059,10 | 471.726.258.260,88 |
| Nusa Tenggara Barat | 4.955.600,00 | 123.862.000,00 | 24.994.349,83 | 0,0189 | 941.744.676.691.569,00 | 17.820.053.769.767,20 |
| Nusa Tenggara Timur | 5.287.300,00 | 90.785.000,00 | 17.170.389,42 | 0,0202 | 1.483.160.217.003.360,00 | 29.943.434.519.343,30 |
| Kalimantan Barat | 4.932.500,00 | 177.491.000,00 | 35.983.983,78 | 0,0188 | 388.020.061.394.771,00 | 7.308.039.159.931,52 |
| Kalimantan Tengah | 2.605.300,00 | 125.824.000,00 | 48.295.397,84 | 0,0099 | 54.564.973.303.056,90 | 542.814.297.657,74 |
| Kalimantan Selatan | 4.119.800,00 | 159.181.000,00 | 38.638.040,68 | 0,0157 | 290.503.660.356.970,00 | 4.569.906.705.191,54 |
| Kalimantan Timur | 3.575.400,00 | 592.280.000,00 | 165.654.192,54 | 0,0137 | 12.093.837.249.134.500,00 | 165.108.087.759.275,00 |
| Kalimantan Utara | 691.100,00 | 76.982.000,00 | 111.390.536,83 | 0,0026 | 3.103.417.832.598.250,00 | 8.189.563.150.566,33 |
| Sulawesi Utara | 2.461.000,00 | 110.121.000,00 | 44.746.444,53 | 0,0094 | 119.590.935.900.087,00 | 1.123.801.144.866,48 |
| Sulawesi Tengah | 2.966.300,00 | 133.951.000,00 | 45.157.603,75 | 0,0113 | 110.767.307.475.603,00 | 1.254.602.829.517,49 |
| Sulawesi Selatan | 8.690.300,00 | 415.745.000,00 | 47.840.120,59 | 0,0332 | 61.498.344.440.253,40 | 2.040.693.520.428,29 |
| Sulawesi Tenggara | 2.602.400,00 | 107.424.000,00 | 41.278.819,55 | 0,0099 | 207.457.616.366.967,00 | 2.061.498.512.676,06 |
| Gorontalo | 1.168.200,00 | 34.538.000,00 | 29.565.142,95 | 0,0045 | 682.101.118.405.998,00 | 3.042.604.865.315,62 |
| Sulawesi Barat | 1.331.000,00 | 39.584.000,00 | 29.740.045,08 | 0,0051 | 672.995.848.652.140,00 | 3.420.345.932.432,16 |
| Maluku | 1.744.700,00 | 39.882.000,00 | 22.858.944,23 | 0,0067 | 1.077.366.684.458.310,00 | 7.177.346.194.061,75 |
| Maluku Utara | 1.209.300,00 | 32.273.000,00 | 26.687.339,78 | 0,0046 | 840.702.418.249.388,00 | 3.882.003.667.897,53 |
| Papua Barat | 915.400,00 | 71.791.000,00 | 78.425.824,78 | 0,0035 | 517.272.076.328.803,00 | 1.808.046.246.247,53 |
| Papua | 3.265.200,00 | 188.945.000,00 | 57.866.286,90 | 0,0125 | 4.770.197.997.659,73 | 59.473.813.339,67 |
| Rata-rata PDRB per Kapita | | | 55.682.208,61 |  |  | 41.277.472,72 |
|  |  |  |  |  |  | 41.277.472,72 |
|  |  |  |  |  | **Indeks Williamson** | **0,74130** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2018** | **Jumlah Penduduk (Jiwa)** | **PDRB (Juta Rp)** | **PDRB per Kapita (Rp/tahun)** | **Proporsi Penduduk** |  |  |
| Indonesia | 265.015.300,00 | 14.985.962.000,00 |  |  |  |  |
| Aceh | 5.281.300,00 | 155.912.000,00 | 29.521.519,32 | 0,0199 | 916.896.365.078.494,00 | 18.272.170.598.788,30 |
| Sumatera Utara | 14.415.400,00 | 741.193.000,00 | 51.416.748,75 | 0,0544 | 70.309.352.214.919,10 | 3.824.448.761.709,02 |
| Sumatera barat | 5.382.100,00 | 230.529.000,00 | 42.832.537,49 | 0,0203 | 287.956.412.312.389,00 | 5.848.002.763.261,24 |
| Riau | 6.814.900,00 | 755.274.000,00 | 110.826.864,66 | 0,0257 | 2.603.555.594.174.270,00 | 66.950.742.159.936,60 |
| Jambi | 3.570.300,00 | 208.379.000,00 | 58.364.563,20 | 0,0135 | 2.065.695.521.186,54 | 27.829.158.238,38 |
| Sumatera Selatan | 8.370.300,00 | 419.723.000,00 | 50.144.319,80 | 0,0316 | 93.267.232.337.509,60 | 2.945.772.243.469,18 |
| Bengkulu | 1.963.300,00 | 66.413.000,00 | 33.827.229,66 | 0,0074 | 674.679.133.785.963,00 | 4.998.192.720.805,11 |
| Lampung | 8.370.500,00 | 333.681.000,00 | 39.863.926,89 | 0,0316 | 397.519.421.149.868,00 | 12.555.638.541.378,50 |
| Kep. Bangka Belitung | 1.459.900,00 | 73.069.000,00 | 50.050.688,40 | 0,0055 | 95.084.488.835.204,50 | 523.795.589.350,94 |
| Kep. Riau | 2.136.500,00 | 249.077.000,00 | 116.581.792,65 | 0,0081 | 3.223.965.751.877.120,00 | 25.990.962.894.917,60 |
| DKI Jakarta | 10.467.600,00 | 2.599.174.000,00 | 248.306.584,13 | 0,0395 | 35.534.047.617.384.000,00 | 1.403.527.256.123.430,00 |
| Jawa Barat | 48.683.700,00 | 1.962.232.000,00 | 40.305.728,61 | 0,1837 | 380.097.422.320.097,00 | 69.824.454.961.675,40 |
| Jawa Tengah | 34.490.800,00 | 1.268.701.000,00 | 36.783.751,03 | 0,1301 | 529.831.313.647.865,00 | 68.955.663.589.105,20 |
| D.I. Yogyakarta | 3.802.900,00 | 129.877.000,00 | 34.152.094,45 | 0,0143 | 657.908.213.871.806,00 | 9.440.810.196.743,70 |
| Jawa Timur | 39.500.900,00 | 2.189.784.000,00 | 55.436.306,51 | 0,1491 | 19.057.672.811.773,10 | 2.840.572.706.445,88 |
| Banten | 12.689.700,00 | 614.764.000,00 | 48.445.904,95 | 0,0479 | 128.956.715.188.594,00 | 6.174.820.958.369,95 |
| Bali | 4.292.200,00 | 234.431.000,00 | 54.617.911,56 | 0,0162 | 26.872.864.933.928,90 | 435.234.157.686,03 |
| Nusa Tenggara Barat | 5.013.700,00 | 123.872.000,00 | 24.706.703,63 | 0,0189 | 1.231.666.910.061.850,00 | 23.301.327.836.457,40 |
| Nusa Tenggara Timur | 5.371.500,00 | 99.087.000,00 | 18.446.802,57 | 0,0203 | 1.710.237.133.444.420,00 | 34.664.182.642.650,10 |
| Kalimantan Barat | 5.001.700,00 | 194.033.000,00 | 38.793.410,24 | 0,0189 | 441.353.111.323.492,00 | 8.329.767.590.424,81 |
| Kalimantan Tengah | 2.660.200,00 | 138.741.000,00 | 52.154.349,30 | 0,0100 | 58.483.746.524.497,70 | 587.054.643.654,42 |
| Kalimantan Selatan | 4.182.700,00 | 171.936.000,00 | 41.106.462,33 | 0,0158 | 349.516.247.640.406,00 | 5.516.366.824.879,65 |
| Kalimantan Timur | 3.648.800,00 | 638.117.000,00 | 174.884.071,48 | 0,0138 | 13.243.925.532.086.800,00 | 182.345.832.416.009,00 |
| Kalimantan Utara | 716.400,00 | 86.059.000,00 | 120.127.024,01 | 0,0027 | 3.639.130.724.857.430,00 | 9.837.444.295.811,84 |
| Sulawesi Utara | 2.484.400,00 | 119.544.000,00 | 48.117.855,42 | 0,0094 | 136.514.934.201.311,00 | 1.279.766.498.499,28 |
| Sulawesi Tengah | 3.010.400,00 | 150.636.000,00 | 50.038.533,09 | 0,0114 | 95.321.692.700.055,40 | 1.082.791.913.162,17 |
| Sulawesi Selatan | 8.772.000,00 | 462.342.000,00 | 52.706.566,35 | 0,0331 | 50.342.567.215.807,10 | 1.666.337.753.394,09 |
| Sulawesi Tenggara | 2.653.700,00 | 118.093.000,00 | 44.501.262,39 | 0,0100 | 234.106.939.925.631,00 | 2.344.202.717.656,85 |
| Gorontalo | 1.185.500,00 | 37.736.000,00 | 31.831.294,81 | 0,0045 | 782.350.053.871.047,00 | 3.499.707.333.365,76 |
| Sulawesi Barat | 1.355.600,00 | 43.545.000,00 | 32.122.307,47 | 0,0051 | 766.155.191.098.322,00 | 3.919.018.928.540,67 |
| Maluku | 1.773.800,00 | 43.065.000,00 | 24.278.385,39 | 0,0067 | 1.261.914.120.412.600,00 | 8.446.241.657.700,03 |
| Maluku Utara | 1.232.600,00 | 36.498.000,00 | 29.610.579,26 | 0,0047 | 911.510.773.918.857,00 | 4.239.484.210.656,45 |
| Papua Barat | 937.500,00 | 79.644.000,00 | 84.953.600,00 | 0,0035 | 632.612.239.857.080,00 | 2.237.885.793.258,02 |
| Papua | 3.322.500,00 | 210.660.000,00 | 63.404.063,21 | 0,0125 | 12.976.185.140.106,60 | 162.682.588.997,71 |
| Rata-rata PDRB per Kapita | | | 59.801.815,97 |  |  | 1.996.596.463.770.430,00 |
|  |  |  |  |  |  | 44.683.290,66 |
|  |  |  |  |  | **Indeks Williamson** | **0,74719** |

1. Analisis Pertumbuhan Ekono­mi dan Ketimpangan Pendapatan Antar Kecamatan Di Kabupaten Gianyar [↑](#footnote-ref-1)
2. Analisis pengaruh per­tumbuhan ekonomi dan ketimpangan penda­patan terhadap Pengentasan kemiskinan di kawasan mebidangro. [↑](#footnote-ref-2)
3. Perekonomian Indonesia: Beberapa Masalah Penting. [↑](#footnote-ref-3)
4. Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pendapatan Antar Kabupaten di Kalimantan Timur [↑](#footnote-ref-4)
5. Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pendapatan Antar Kabupaten di Kalimantan Timur [↑](#footnote-ref-5)
6. Analisis Kesenjangan Antarwilayah 2013, BAPPENAS [↑](#footnote-ref-6)
7. Analisis Kesenjangan Antarwilayah [↑](#footnote-ref-7)
8. Perekonomian Indonesia: Beberapa Masalah Penting. [↑](#footnote-ref-8)
9. Pertumbu­han Ekonomi dan Ketimpangan antar Keca­matan di Kabupaten Banyumas, 1993-2000. [↑](#footnote-ref-9)
10. Lihat lampiran [↑](#footnote-ref-10)
11. https://www.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/1116 [↑](#footnote-ref-11)